

## Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo

Fatmawaty Laraga<sup>1</sup>, Idrus Usu<sup>2</sup>, Ilyas Lamuda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo  
e-mail: [hakolaraga01978@gmail.com](mailto:hakolaraga01978@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Gorontalo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan melakukan analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk mengukur keterpengaruh digunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah, Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah dan Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

**Kata kunci:** Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah, rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah

### Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of regional financial management on regional self-reliance in districts/cities in Gorontalo Province. The analytical method used in this study uses quantitative analysis by analyzing the Regional Financial Performance Ratio, namely the Effectiveness Ratio of Regional Original Income, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Regional Financial Independence Ratio. Furthermore, to measure the influence, Multiple Linear Regression Analysis was used. The results of the study show that: 1) The growth ratio of local government revenue has a positive and significant effect on the ratio of local government fiscal decentralization, the effectiveness ratio of regional original income has a negative and significant effect on the ratio of local government fiscal decentralization and the ratio of growth of regional original income and the effectiveness ratio of regional original income simultaneously has a positive and significant effect on the ratio of fiscal decentralization of district/city governments in Gorontalo Province.

**Keywords :** growth ratio of regional original income, effective ratio of regional original income, the ratio of local government fiscal decentralization

### PENDAHULUAN

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah "bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah.

Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggungjawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya bahwa daerah provinsi perlu didorong dan harus mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (UU Nomor 22 tahun 1999), dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997 : 42 ; A Halim, 2001 : 348). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan Provinsi Gorontalo mengalami defisit sebesar 0,89%. Dari rencana penerimaan sebesar 2,02 triliun rupiah dalam realisasinya hanya diperoleh 2,00 triliun rupiah. Dari sisi belanja juga menurun seiring dengan penerimaan daerah. Untuk belanja tidak langsung yang semula dianggarkan 1,04 triliun rupiah, terealisasi 1,01 triliun atau turun sebesar 2,39%. Sementara itu realisasi belanja langsung turun sebesar 5,69% dari rencana anggaran 0,98 triliun rupiah terealisasi hanya sebesar 0,92 triliun rupiah. Dari segi kemandirian daerah, persentase pendapatan

asli daerah terhadap total pendapatan masih tergolong kecil yaitu hanya sebesar 22,33% dimana ini mengindikasikan bahwa keuangan daerah pemerintah Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## METODE

Metode analisis Kuantitatif dalam penelitian ini adalah Analisa rasio keuangan daerah sebagai berikut:

a. Rasio pertumbuhan PAD

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Sumber : Abdul Halim 2007:241

b. Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Mohammad Mahsun (2012:187)

c. Rasio desentralisasi fiskal

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Sumber : Sukanto Reksohadiprojo, 1999

Selanjutnya digunakan metode analisis regresi berganda untuk menganalisa Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Gorontalo

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan untuk menghitung arah dan besarnya pengaruh variabel *independent* (Rasio Pertumbuhan PAD dan Rasio Efektivitas PAD) terhadap variable *dependent* (Rasio Desentralisasi Fiskal) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Untuk pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23.

**Tabel 1 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	18.377	4.374		4.201	.000			
Rasio Pertumbuhan PAD	.087	.036	.429	2.440	.020	.262	.391	.384
Rasio Efektivitas PAD	-.096	.045	-.375	2.132	.041	-.184	-.348	-.336

a. Dependent Variable: Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 18,377 + 0.429X_1 - 0.375X_2$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 18,377 berarti jika Rasio Pertumbuhan PAD (X1) dan Rasio Efektivitas PAD (X2) nilainya adalah nol, maka Rasio Desentralisasi Fiskal (Y) nilainya adalah konstan atau tetap diangka 18,377 satuan.

- 2) Variabel Rasio Pertumbuhan PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,49 yang berarti apabila rasio pertumbuhan PAD mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka rasio desentralisasi fiskal akan naik sebesar 0.49 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan menunjukkan hubungan positif (searah).
- 3) Variabel Rasio Efektifitas PAD memiliki nilai koefisien sebesar  $-0,375$  artinya jika variabel rasio efektifitas PAD mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka rasio desentralisasi fiskal akan turun sebesar  $-0,375$  satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan dan (menunjukkan hubungan berlawanan).

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Statistik-F (Uji Serempak)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel *independent* memiliki pengaruh serempak yang signifikan terhadap variabel *dependent*.

**Tabel 2. Uji statistik F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.777	2	82.888	3.656	.037 <sup>b</sup>
	Residual	748.169	33	22.672		
	Total	913.945	35			

a. Dependent Variable: Rasio Desentralisasi Fiskal

b. Predictors: (Constant), Rasio Efektifitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel *independent* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 3,656 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi rasio desentralisasi fiskal atau dapat dikatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD dan rasio efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

### b. Uji t Statistik (Uji Parsial)

Uji t merupakan uji statistik yang berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel *independent* secara parsial terhadap *Return on Assets*. Dari tabel koefisien menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut sebagai berikut :

**Tabel 3. Uji Statistik t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	18.377	4.374		4.201	.000			
Rasio Pertumbuhan PAD	.087	.036	.429	2.440	.020	.262	.391	.384
Rasio Efektifitas PAD	-.096	.045	-.375	2.132	.041	-.184	-.348	-.336

a. Dependent Variable: Rasio Desentralisasi Fiskal

Dengan demikian hasil analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisa sebagai berikut :

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel rasio pertumbuhan PAD, atau  $b_1$  adalah sebesar 0,49, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau  $2,440 > 2,032$  dan signifikansi  $p = 0.020 < 0.05$ , maka hipotesis pertama dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel rasio pertumbuhan PAD terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa rasio efektifitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas PAD, atau  $b_2$ , adalah sebesar -0,375 dengan tingkat signifikan sebesar 0,041. Dari Tabel 12 diperoleh t-hitung = -2.132. Nilai t-hitung < t-tabel,  $-2.132 < 2,032$  dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0.041 < 0.05$ ). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa rasio efektifitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tidak dapat diterima.

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independent mempengaruhi variabel dependent

**Tabel 5 :Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.426 <sup>a</sup>	.181	.132	4.76149	.181	3.656	2	33	.037	.417

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektifitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD

b. Dependent Variable: Rasio Desentralisasi Fiskal

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi untuk ketiga variabel bebas diperoleh angka nilai R Square sebesar 0.181. Artinya variabel rasio pertumbuhan PAD dan rasio efektifitas PAD memberi sumbangan pengaruh terhadap rasio desentralisasi fiskal sebesar 18.1%. Sedangkan sisanya sebesar 81.9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda secara simultan variabel rasio pertumbuhan PAD dan rasio efektifitas PAD berpengaruh signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Adapun pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel dependent adalah sebagai berikut :

#### **d. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD terhadap Rasio Desentralisasi Fiskal**

Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel rasio pertumbuhan PAD, atau  $b_1$  adalah sebesar 0,49, bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel (0.05,36) adalah 2,032. Oleh karena t-hitung > t-tabel atau  $2,440 > 2,032$  dan signifikansi  $p = 0.020 < 0.05$ , maka hipotesis pertama dapat diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel rasio pertumbuhan PAD terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Pertumbuhan PAD menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD. Semakin baik kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya maka derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan semakin baik, dimana pemerintah daerah mampu menggali dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Engleni (2001) yang meneliti tentang PAD di Kota Padang menyimpulkan perlunya rencana penerimaan PAD jangka menengah yang memenuhi unsur rasionalitas dan berorientasi ke depan. Skenario ini merupakan langkah penting sebagai respon semangat kemandirian pendanaan daerah. Disamping sebagai pedoman penentuan langkah dan tindakan oleh dinas/unit kerja pengelola penerimaan PAD, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

#### **e. Pengaruh Rasio Efektifitas PAD terhadap Rasio Desentralisasi Fiskal**

Dari hasil penelitian ini diperoleh koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas PAD, atau  $b_2$ , adalah sebesar -0,375 dengan tingkat signifikan sebesar 0,041. Dari Tabel 12 diperoleh t-hitung = -2.132. Nilai t-hitung < t-tabel,  $-2.132 < 2,032$  dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0.041 < 0.05$ ). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa rasio efektifitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tidak dapat diterima. Nilai negatif pada variabel rasio efektifitas PAD menunjukkan adanya pengaruh yang berlawanan arah, maksudnya apabila variabel rasio efektifitas PAD meningkat maka rasio desentralisasi fiskal akan turun, pun sebaliknya apabila rasio efektifitas PAD turun maka rasio desentralisasi akan meningkat. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Atau dalam kata lain adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan perolehan PAD yang telah ditargetkan pada tahun berjalan.

Selama enam tahun terakhir efektifitas perolehan PAD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 95,61% namun ternyata angka ini belum mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini terlihat dari masih cukup kecilnya porsi perolehan PAD dibandingkan total pendapatan daerah, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo masih cukup bergantung dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga ini mengakibatkan derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo masih kurang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard Tumilaar (1997), dalam tesisnya menganalisis derajat

otonomi fiskal di Propinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat bantuan pemerintah pusat

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.
2. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.
3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Afiah, N. N. (2009). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggreni Dan Artini (2019). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, No. 3, 2019: 1315 - 1345 Issn: 2302-8912 Doi: <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V8.I3.P6>
- Badrudin, R. (2011). Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi.
- Deputi Iv Bpkp. (2005). Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta: Bpkp.  
Doi: <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I03.P05>
- Erlina, Dkk. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ghozali, I., (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A., & Darmayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Made A.J & Ni Putu Santi S.(2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281 Issn : 2302-8912.
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi, Edisi Ke Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Murmaningtyas, V. W. K. (2007). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Nisa A.A (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 2/2017 Hal. 203-214

- Nurlis. (2016). The Factors Affecting Of The Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government Of Indonesia. *Research Journal Of Finance And Accounting*. Issn 2222-2847. Vol. 7, No. 1. Hal. 107-113.
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sari Et Al (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 Issn: 2301-8879
- Sarwono, Jonathan. (2015). *Rumus-Rumus Populer Dalam Spss 22 Untuk Riset*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 18(1).
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sesung, R. (2013). *Hukum Otonomi Daerah: Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Pt. Refika Aditama, Bandung
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 3(1).
- Susanti, D. A. (2017). *Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomisasi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Wijayanti Dan Darsana (2015); Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ep Unud*,4[3] : 1164-1193 Issn : 2303-0178
- Wiraswasta Et Al (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 5 No.2, Juni 2018, P 170-180 P-Issn : 1829-7528 E-Issn : 2581-1584